

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Hubungan antara Indonesia dan China adalah satu hal yang amat penting, baik bagi Indonesia maupun untuk China sendiri. Hubungan Bilateral Indonesia-China yang pernah membeku sepanjang pemerintahan Orde Baru, kini makin membaik, dan bahkan China merupakan salah satu mitra yang penting bagi Indonesia. Secara geopolitik, posisi Indonesia sangat strategis di kawasan Asia Pasifik dan Selat Malaka. Sedangkan secara ekonomi, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan mineral, baik di darat maupun di laut. Kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa ini jelas sangat menggoda negara-negara industri yang sedang maju saat ini seperti China untuk menguasainya, langsung ataupun tidak langsung. Disamping itu, dengan jumlah penduduk lebih dari 243 juta jiwa, Indonesia adalah pasar potensial bagi produk-produk negara-negara industri.

Sedangkan China sendiri adalah dulunya merupakan negara berkembang yang dimana pemerintahannya masih menerapkan sistem tertutup dan belum terbuka dengan negara lainnya, akan tetapi kini sudah berubah menjadi negara maju yang perekonomiannya terus berkembang pesat bahkan sudah mengalahkan perkembangan negara-negara di kawasan Eropa, dan China sekarang adalah negara yang sangat terbuka dengan investasi asing semenjak liberalisasi ekonomi yang dibawa pada tahun 1979 oleh Den Xioping.

Salah satu cara untuk mempererat hubungan satu negara dengan negara lainnya adalah dengan melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Dengan perdagangan internasional, perekonomian akan saling terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lain serta lalu lintas barang dan jasa akan membentuk perdagangan antar bangsa. Perdagangan internasional pada saat ini secara tidak langsung mendorong terjadinya globalisasi, hal ini ditandai dengan semakin

berkembangnya sistem inovasi teknologi informasi, perdagangan, reformasi politik, transnasionalisasi sistem keuangan, dan investasi. Dan ini bisa menjadi modal yang penting bagi suatu negara untuk menarik investor masuk ke dalam negerinya untuk menanam investasi di negaranya. Apalagi didukung dengan situasi politik yang kondusif dan lingkungan bisnis yang kompetitif di dalam negara tersebut, maka bukan tidak mungkin perkembangan ekonomi negara tersebut akan tumbuh semakin cepat.

Seperti halnya hubungan antara Indonesia dan China, hubungan ini sangat lekat dengan adanya perdagangan internasional, dan salah satu perdagangan diantara kedua negara ini yang masih baru dan juga masih berjalan sampai saat ini adalah adanya perdagangan bebas CAFTA (*China Asean Free Trade Area*). Sejak CAFTA diterapkan, jumlah perusahaan China yang menanamkan investasi di Indonesia juga bertambah. Hingga akhir 2010 terdapat lebih dari seribu perusahaan China yang tercatat di Indonesia, dengan investasi langsung mencapai 2,9 miliar dollar AS atau naik 31,7 persen dari tahun sebelumnya (Hubungan Indonesia China didalam ACFTA 2011, hlm. 1).

Kebijakan China mulai terbuka (*open door policy*) yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Cina, sejak akhir tahun 1970an, Cina tercatat mengalami perkembangan menjadi salah satu negara dengan perdagangan paling dinamis di seluruh dunia (Lu 1995, hlm. 43).

China merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi dunia, dan bersama dengan dua negara Asia Timur lainnya yaitu Jepang dan Korea Selatan telah menjadi mitra dagang terpenting Indonesia dan juga ASEAN dari tahun ke tahun. Untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan Cina, ASEAN, di mana Indonesia menjadi salah satu anggota-telah menyepakati kerjasama perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Dalam kerangka perjanjian tersebut, negara-negara yang menjadi anggota perjanjian saling memberikan preferential treatment di tiga sektor: sektor barang, jasa dan investasi dengan tujuan memacu percepatan aliran barang, jasa dan investasi diantara negara-negara anggota sehingga dapat terbentuk suatu kawasan perdagangan bebas. Preferential treatment adalah perlakuan khusus yang lebih menguntungkan dibandingkan perlakuan yang diberikan kepada negara mitra

dagang lain non anggota pada umumnya. Dalam kesepakatan di sektor barang, komponen utamanya adalah preferential tariff.

China memang terlihat sangat aktif dalam berbagai kerja sama bilateral Asia Tenggara. Salah satunya kerja sama perdagangan dengan Indonesi. Salah satu bentuk upaya aktif China adalah dengan bersedia tidak mendevaluasi Yuan. Devaluasi atau menetapkan mata uang lebih rendah dari harga pasar akan membuat produk China menjadi jauh lebih murah dibanding dengan produk negara-negara lain. Dengan kebijakan devaluasi, produsen China berpotensi menguasai pasar Asia Tenggara 9 (Shirk 2004, hlm. 40).

Indonesia –China telah menjadi mitra ekonomi sejak lama, kedua belah pihak terus mendorong kerja sama di bidang budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata dan lainnya. Serta memelihara hubungan kerjasama yang baik dalam menangani isu-isu global dan mempromosikan reformasi struktur pemerintahan global. Seiring dengan penguatan kemitraan yang strategis antar kedua Negara, terjadi perluasan pada bidang kerjasama, serta hubungan politik, ekonomi dan budaya yang menjadi semakin kuat.

Pemerintah kedua Negara telah aktif berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan, stabil, dan cepat, kerja sama ekonomi dan perdagangan bilateral terus meningkat. Oleh karena itu, konsolidasi dan pengembangan lebih lanjut dalam hubungan kerjasama saat ini dan perluasan bidang kerjasama telah menjadi faktor yang penting dalam upaya untuk memperdalam hubungan bilateral dan selanjutnya untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi kedua Negara.

Pengembangan kelapa sawit di Indonesia dimulai sejak 1970 dan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat terutama periode 1980-an. Pada tahun 1980 areal kelapa sawit hanya seluas 294 ribu ha dan terus meningkat dengan pesat sehingga pada tahun 2009 mencapai 7,32 juta ha, dengan rincian 47,81% berupa perkebunan besar swasta (PBS), 43,76% perkebunan rakyat (PR), dan 8,43% perkebunan besar Negara (PBN) . (BAPPENAS 2010, Hlm. 1)

Dengan luas areal tersebut, Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2009, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 20,6 juta ton, diikuti oleh Malaysia pada urutan kedua dengan produksi

17,57 juta ton. Produksi kedua negara ini mencapai 85% dari produksi dunia yang sebesar 45,1 juta ton. Sebagian besar hasil produksi minyak sawit di Indonesia merupakan komoditi ekspor. (*ibid*).

Pangsa ekspor kelapa sawit hingga tahun 2008 mencapai 80% dari total produksi. Negara tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia adalah India dengan pangsa sebesar 33%, Cina sebesar 13%, dan Belanda 9% dari total ekspor kelapa sawit Indonesia (*ibid*).

Seperti yang diketahui bersama bahwa Indonesia memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang sangat luas. Tercatat hingga tahun 2013 luas perkebunan kelapa sawit Indonesia yakni 6170,7 ribu hektar (bps 2012, hlm 1). Produktivitas kelapa sawit Indonesia dari tahun 2006 sudah mengalami peningkatan dan mengalahkan produktifitas Malaysia, ini memperlihatkan efisiennya pengolahan kelapa sawit di Indonesia.

Kelapa sawit merupakan anugerah bagi Indonesia dan daerah-daerah tropis. Pasalnya, jenis tanaman ini hanya bisa tumbuh subur di kawasan tropis dan produksinya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat terkhusus potensi luar biasa bagi Indonesia. Industri kelapa sawit menjadi salah satu industri yang banyak menyerap tenaga kerja lebih kurang 10 juta orang baik yang bekerja dari Industri hilir dan Industri hulu perkebunan kelapa sawit yang secara langsung maupun tidak langsung. Secara Makro ekonomi kelapa sawit berkontribusi terhadap Indonesia sebesar \$ 16,5 milyar atau sekitar 160 triliun per tahun (Sutana 2010, hlm 2)

Sektor industri kelapa sawit selama ini sangat strategis bagi kepentingan ekonomi nasional. Selama ini sawit menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan hajat hidup petani sawit rakyat. Sudah sepantasnya pemerintah Indonesia harusnya menjadi frontliner dan menjadi panglima perang di perdagangan CPO (*crude palm oil*) atau minyak mentah sawit global. Hingga pada akhirnya menjadi kebanggaan di negeri ini.

Melihat dari factor baiknya produktivitas minyak kelapa sawit tersebut, minyak kelapa sawit adalah salah satu komoditas utama Indonesia yang di ekspor ke China. , China merupakan pasar tradisional bagi Indonesia yang sangat membutuhkan CPO. Sehingga dengan pemulihan ekonomi di negara maju seperti

Amerika Serikat dan Jepang maka kebutuhan terhadap produk China akan meningkat (liputan6.com 2011, Pasar Minyak Kelapa sawit Indonesia, hlm 2). Beberapa Negara-negara tujuan utama Indonesia mengekspor sawit yakni China, Hongkong, India, Vietnam Jerman, Singapura dan Malaysia.

Minyak sawit adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak yang murah, mudah diproduksi dan sangat stabil ini digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga bisa digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel. Kebanyakan minyak sawit diproduksi di Asia, Afrika dan Amerika Selatan karena pohon sawit membutuhkan suhu hangat, sinar matahari, dan curah hujan tinggi untuk memaksimalkan produksinya. Efek samping yang negatif dari produksi minyak sawit selain dampaknya kepada kesehatan manusia karena mengandung kadar lemak yang tinggi adalah fakta bahwa bisnis minyak sawit menjadi sebab kunci dari penggundulan hutan di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia.

Industri kelapa sawit mempunyai rantai bisnis yang cukup panjang dan saling terkait. Mulai dari penyiapan lahan, pembibitan, supporting industri, pengolahan di industri hulu sampai pada industri hilir. Kebijakan pengembangan sektor ini benar-benar harus melalui koordinasi yang kuat antar instansi terkait sehingga bisa mencapai hasil yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal ini Indonesia banyak melakukan ekspor minyak kelapa sawit ke Negara-negara seperti China, India dan Pakistan.

Produk olahan dari kelapa sawit yang kaya akan manfaat mempunyai peluang ekspor yang cukup besar di pasar internasional, selain diolah sebagai bahan baku industri minyak goreng, margarin, sabun dll. CPO juga dapat dijadikan bahan bakar alternatif nabati pengganti minyak bumi yang dapat diperbaharui. Namun volume Ekspor CPO Indonesia yang cenderung berfluktuatif dan mengalami penurunan dapat menjadikan kendala ekspor dalam perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Produksi CPO Indonesia, kurs Rupiah/Dolar AS, dan harga minyak mentah dunia) terhadap variabel dependen (Ekspor CPO) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini menggunakan data runtut waktu atau time series. Model analisis yang digunakan adalah alat analisis ekonometrika

model koreksi kesalahan (Error Correction Model/ECM). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor CPO Indonesia. Bagi produsen CPO Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksinya, mencermati perkembangan harga minyak mentah dunia dan pergerakan kurs rupiah terhadap Dolar Amerika.

Kerjasama perdagangan perdagangan kelapa sawit Indonesia ke China berangsur-angsur mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Namun, semenjak pemerintahan China memberlakukan kebijakan Residu Pestisida 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian China. Kementerian ini bekerja sama untuk membangun mekanisme dan prosedur kerja terkait standar batas residu maksimum, berdasarkan Hukum Keamanan Pangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Konsulat (Ministry of Health and Ministry Of Agriculture Released MRL Standards” *China Pesticide Information Network*. *Press office of the ministry of agriculture International union of pure and Applied Chemistry*. “*Pesticide Residue*” *Compendium Of Chemical Terminology*, 2011). Semenjak diterapkannya kebijakan Residu Peptisida tersebut pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi kepada pemerintahan China. Residu Pestisida sendiri yakni pestisida yang masih tersisa pada bahan pangan setelah diaplikasikan ke tanaman pertanian (International Union Of Pure and Alied Chemistry 2014, hlm 30).

Semenjak diberlakukannya kebijakan pemerintah China mengenai Residu Pestisida, pemerintah Indonesia membuat statement melalui Fadhil Hasan (Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) “penurunan kinerja ekspor Indonesia ini dipengaruhi juga oleh faktor dalam dan luar negeri lainnya. Faktor dari dalam negeri adalah karena adanya peningkatan penyerapan dalam negeri karena berkembangnya industri hilir” (Agrofarm.co.id 2011, hlm 1)

Berbagai klaim terhadap produk ekspor pertanian Indonesia di banyak negara sudah sering terjadi. Di dalam negeri hal ini tentu saja menimbulkan kerugian besar baik bagi negara, eksportir maupun petani. Penolaan tersebut antara lain adanya beberapa produk CPO Indonesia yang belum memenuhi Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida yang sudah ditetapkan pemerintah. Pada era

perdagangan bebas globalisasi saat ini, Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida sudah merupakan salah satu instrumen hambatan non tarif yang dimanfaatkan oleh banyak negara untuk memperlancar ekspor produk-produk pertanian dan menghambat impor produk-produk pertanian yang sama. Suatu negara akan berusaha untuk semakin menurunkan nilai Batas Maksimum Residu sehingga menyulitkan negara lain untuk memasukkan produk-produk pertaniannya ke negara tersebut. Sebaliknya suatu negara akan berusaha untuk meningkatkan Batas Maksimum Residu dengan menggunakan analisis dan argumentasi ilmiah. Hal ini dimungkinkan karena sesuai dengan ketentuan Perjanjian SPS.

Saat ini, Indonesia telah mempunyai ketetapan BMR Pestisida pada Hasil Pertanian yang dikeluarkan melalui Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 711/Kpts/TP.27/8/96. Rincian BMRP pada hasil pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan baik yang dapat dikonsumsi maupun tidak langsung dikonsumsi dapat dilihat pada Lampiran SKB tersebut. SKB menyatakan bahwa hasil pertanian yang beredar di Indonesia baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri tidak boleh mengandung residu pestisida melebihi BMR yang ditetapkan. Sedangkan hasil pertanian yang dimasukkan dari luar negeri yang mengandung residu pestisida melebihi BMR harus ditolak. Nilai BMR untuk setiap kombinasi komoditi dan jenis pestisida yang tertung dalam SKB tersebut diadopsi dari Hasil Keputusan CCPR pada tahun 1996 (Indonesia 2010, hlm 3).

Direktorat Jenderal Perkebunan melalui keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 87/Kpts/SR.140/03/2009, tanggal 25 Maret 2009 membentuk "Tim Kajian Penggunaan Herbisida *2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid* pada Tanaman CPO". Hasil analisis residu herbisida yang dilakukan oleh Prof. Dr. Sri Noegrohati, MSc di Laboratorium Farmasi UGM menunjukkan bahwa sampel kelapa sawit dari Sulawesi Indonesia secara umum mengandung residu herbisida 2,4- D yang sangat rendah dan jauh di bawah Batas Maksimum Residu (*Maximum Residue Limit*) yang ditetapkan oleh Pemerintah China yaitu 0,01 ppm. Kadar 2,4- D paling tinggi yang terdeteksi adalah 0,001 ppm. (Indonesia 2010, hlm 2).

Sama halnya yang dirasakan oleh Malaysia, Chinapun mengimpor produk kelapa sawit dari Malaysia meskipun volume ekspor Malaysia ke China tidak

sebesar ekspor Indonesia ke China. Malaysia pun ikut merasakan dampak pemberlakuan kebijakan residu oleh pemerintah China. Malaysia memiliki ambang batas maksimum residu sebesar 0,01 ppm. Ambang batas maksimum residu Malaysia masih diatas ambang batas maksimum residu yang di miliki Indonesia, dengan adanya hal tersebut produk CPO Indonesia masih lebih unggul dibandingkan dengan produk Malaysia. (*batas maksimum residu 2011*, hlm.1)

Perdagangan CPO Malaysia ke China tidak selalu berjalan mulus dikarenakan pemerintah China kerap menahan produk CPO dari Malaysia. Secara teknis Malaysia tidak melanggar aturan kebijakan residu pestisida yang diberlakukan China dengan ambang batas 0,01 ppm, namun bagi China hal itu memperlihatkan bahwa masih tingginya kandungan residu pestisida yang digunakan oleh Malaysia. Seperti yang diungkapkan Sekjen GAPKI Joko Supriyono pemerintah China untuk lebih besar mengimpor produk CPO dari Indonesia daripada Malaysia.

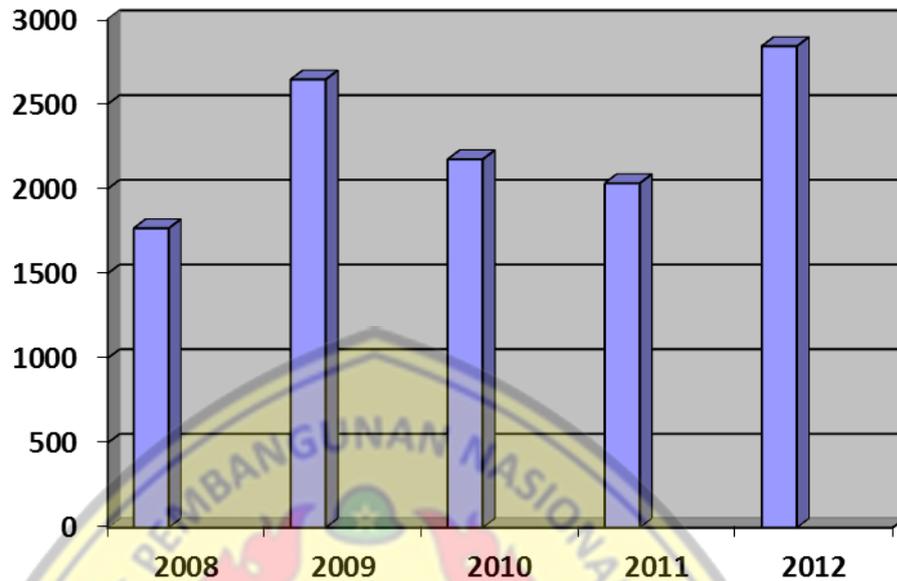
Terkait kebijakan residu pestisida, pemerintah pertama sempat mengeluarkan pernyataan dengan mengupayakan berbagai bentuk keberatan terkait kebijakan residu pestisida yang dikeluarkan oleh pemerintah China. Namun, pemerintah China tetap menerapkan kebijakan tersebut. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut oleh pemerintah China, pemerintah Indonesia mengambil jalur diplomasi terkait permasalahan kebijakan Residu Pestisida China terkait ekspor minyak kelapa sawit Indonesia.

Pada saat ini Indonesia sudah mulai menghadapi hambatan perdagangan non tarif antara lain dalam bentuk Batas Maksimum Residu Pestisida sehingga menyulitkan produk-produk pertanian Indonesia memasuki pasar global. Disamping itu, karena mekanisme pengawasan dan pemeriksaan ketetapan Batas Maksimum Residu di Indonesia belum berjalan, memungkinkan mengalirnya produk-produk pertanian terutama minyak kelapa sawit yang terjadi pada dewasa ini.

Neraca Perdagangan Indonesia – China *)

Periode 2008 - 2012

(berat bersih: 000 ton)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1 Neraca Perdagangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Penurunan volume ekspor minyak kelapa sawit sejak diterapkannya kebijakan residu pestisida tersebut, ekspor ke China mulai dari tahun 2010 sebesar 2174,40 ton, menurun ditahun 2011 menjadi 2023,80 ton. Ditahun 2012 ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2842,10 ton.

Penurunan kinerja ekspor ini diperkirakan terjadi karena kebijakan residu pestisida dan daya beli negara tujuan ekspor China yang lemah. Meskipun harga sudah murah dan bea keluar juga sudah rendah dibandingkan bulan sebelumnya, juga tak mampu mendongkrak ekspor CPO Indonesia. Lemahnya permintaan dari negara tujuan ekspor karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara tujuan utama ekspor dan harga minyak nabati lainnya juga yang rendah (kedelai) sehingga CPO sebagai minyak substitusi tidak dapat bersaing (*lemahnya kinerja ekspor CPO 2012*, hlm.2)

I.2 Rumusan Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas maka untuk menentukan fokus penelitian penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana uaya Indonesia dalam menyikapi kebijakan residu pestisida China?”

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusah permasalahan dan pertanyaan penilitian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis ekspor kelapa sawit indonesia ke China
- b. Menganalisis latar belakang China mengeluarkan kebijakan Residu Pestisida
- c. Menganalisis langkah-langkah Indonesia dalam menyikapi kebijakan Residu Pestisida China.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat membantu program studi Hubungan Internasional dalam memberikan informasi dan data yang terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Seperti mengenai seberapa pentingnya China bagi ekspor CPO Indonesia.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Memberikan kontribusi keilmuan terutama terkait dengan Hubungan Bilateral Indonesia – China dalam perdagangan dalam sektor komoditi minyak sawit.
 - 2) Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai dominasi kekuatan ekonomi China.
 - 3) Mengetahui bentuk atau langkah-langkah diplomasi apa saja yang dilakukan Indonesia terhadap kebijakan regulasi China studi kasus ekspor CPO.
 - 4) Memberikan informasi, kontribusi, dan pengetahuan kepada para mahasiswa bagaimana dinamika perdagangan Indonesia – China

dalam studi kasus ekspor minyak kelapa sawit (CPO) periode 2012-2014.

I.5 Tinjauan Pustaka

Begitu banyak literature yang mengkaji dan membahas mengenai hubungan bilateral Indonesia dengan china, adapun beberapa tulisan yang dijadikan tinjauan bagi penulis antara lain:

Jurnal oleh Reysuli Rahman, Ken Suratiyah, dan Dwi Jono Hadi Darwanto yang berjudul “Permintaan Minyak Kelapa Sawit Indonesia oleh RRC” diterbitkan oleh Agro Jurnal ekonomi tahun 2011. Jadi korelasi jurnal ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan minyak kelapa sawit Indonesia oleh Republik Rakyat China (RRC), yaitu rasio harga minyak kelapa sawit Indonesia dengan Malaysia, pendapatan per kapita RRC, jumlah penduduk RRC dan harga minyak bunga matahari, serta untuk mengetahui trend permintaan minyak kelapa sawit Indonesia oleh RRC. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dilaksanakan pada tahun 2008 - 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara signifikan mempengaruhi jumlah permintaan minyak kelapa sawit Indonesia oleh republik Rakyat China. Sedangkan basil analisis trend menunjukkan bahwa permintaan minyak kelapa sawit Indonesia oleh Republik Rakyat China untuk 3 tahun mendatang akan meningkat.

Selanjutnya paper yang ditulis Bayu Refrinda Fitriadi S.Si yang berjudul *Pentingnya pemenuhan batas maksimum residu (BMR) pestisida pada hasil perkebunan Indonesia*. Jurnal ini mennerangkan betapa pentingnya menggunakan pestisida sesuai BMR yang telah ditentukan oleh Negara. BMR pestisida pada hasil perkebunan sangat penting terutama untuk hasil-hasil perkebunan untuk ekspor. Selain itu, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menerima persetujuan SPS (Sanitary and Phytosanitary) yang berkaitan dengan kandungan residu pestisida pada produk pertanian/perkebunan. Agar hasil pertanian/perkebunan dapat memasuki suatu negara harus mengandung residu pestisida di bawah nilai BMR Pestisida yang ditetapkan oleh suatu negara dengan mengacu ketentuan keamanan pangan/Codex Alimentarius dari WHO. Dalam

jurna ini penulis member tahu bahwa ada Dampak lanjut dari penerapan BMR pestisida di Indonesia adalah dalam rangka pelaksanaan pasar bebas ASEAN (AFTA) dan pasar bebas China-ASEAN (ACFTA) serta penerapan pasar bebas dunia yang sudah mendekat. Indonesia perlu segera memulai dan melaksanakan kegiatan penerapan ketetapan mengenai BMR Pestisida dalam kegiatan perdagangan domestik dan global. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat ekspor hasil pertanian yang biasanya disyaratkan oleh negara-negara pengimpor, maupun sebagai acuan dalam syarat menerima impor hasil pertanian yang masuk ke Indonesia.

Selanjutnya jurnal dari Ernawati Mutadi yang berjudul "*Penurunan pajak ekspor dan dampaknya terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke China: pendekatan error correction model*" yang di terbitkan pada tahun 2007 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan pengembangan Kebijakan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Jurnal ini menerangkan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas penting di Indonesia terutama sebagai sumber pendapatan devisa dan sumber makanan yaitu bahan baku bagi industri minyak goreng. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit kedua terbesar setelah Malaysia, yang menyumbangkan sebesar 34% dari total produksi minyak kelapa sawit dunia pada tahun 2006. Indonesia juga Negara pengonsumsi minyak kelapa sawit terbesar di antara negara-negara sedang berkembang. Pada tahun 2006 Indonesia mengonsumsi lebih dari 5.5 juta minyak kelapa sawit. Dari jumlah tersebut 76,75% dalam bentuk minyak goreng. Sekitar 55% dari produksi minyak kelapa sawit dalam negeri diekspor dalam bentuk minyak sawit mentah, dengan negara-negara di wilayah Asia, terutama India dan Cina sebagai negara tujuan ekspor.

Debat terhadap kebijakan dalam sektor Kelapa sawit di Indonesia dipicu oleh meningkatnya harga minyak goreng yang sangat tajam pada tahun 1994-1995 yang pada akhirnya menghasilkan diberlakukannya pajak ekspor terhadap kelapa sawit dalam rangka menjamin tingkat kebutuhan dalam negeri pada tingkat tertentu. Dengan menggunakan data tahunan pada periode 1969-2006, kajian ini menggunakan pendekatan ekonometrik khususnya pendekatan error correction

model untuk menginvestigasi dampak penurunan pajak ekspor terhadap permintaan impor terhadap kelapa sawit Indonesia ke Cina.

Kontribusi jurnal ini dengan skripsi saya yakni jurnal ini akan menjelaskan mengenai penurunan pajak ekspor dan dampaknya terhadap permintaan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia oleh China.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Teori Diplomasi

Kata “diplomasi” mungkin sudah tidak asing di telinga kita, kita sering mendengar kata diplomasi baik itu dalam berita, surat kabar, ataupun selama perkuliahan. Kata diplomasi berasal dari bahasa Yunani “diploun” yang artinya “melipat”. Kegiatan diplomasi sudah ada sejak Kekaisaran Romawi, dan ternyata pada masa Kekaisaran Romawi tersebut, “diplomas” atau yang dikenal dengan diplomasi diartikan sebagai surat-surat jalan yang melewati negara yang dicetak pada piringan logam double, kemudian dilipat dan dijahit jadi satu dengan cara yang khas. Selain itu diplomasi juga mencakup dokumen-dokumen resmi yang bukan logam seperti perjanjian-perjanjian.

Menurut Harold Nicholson Diplomasi berasal dari kata “diploun” yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti “melipat”. Sedangkan pada zaman kerajaan Romawi terdapat surat-surat jalan yang dicetak melalui piringan logam yang disebut dengan diplomas. Selain dari definisi diatas terdapat juga beberapa definisi lain yang berasal dari pendapat para ahli, berikut penjelasannya: Sir Earnest Satow dalam buku *Guide To Diplomatic Practice*: “penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antar pemerintah Negara-negara berdaulat”. Harold Nicholson: “ terdapat lima hal dalam diplomasi;

- a. Politik luar negeri,
- b. Negosiasi,
- c. Mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut,
- d. Suatu cabang dinas luar negeri,
- e. Mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional.

Dalam buku *The Principle and Practice of Diplomacy*: ”diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan

kepentingan suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain”. Ivo D. Duchacek: “diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu Negara dengan cara negosiasi dengan Negara lain”. Clausewitz, seorang filsuf Jerman: “perang merupakan kelanjutan dari diplomasi dengan melalui sarana lain (Roy, S.L 1991, *Diplomasi* Bab I)

Fungsi utama dari diplomasi adalah untuk mendamaikan beragamnya kepentingan negara-negara di dunia internasional dengan cara negosiasi, dimana diplomasi mempunyai ruang lingkup menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan negara-negara melalui negosiasi yang baik. Secara universal tujuan diplomasi yang baik adalah untuk memilih cara yang tepat untuk mencapai tujuannya. Setiap negara pasti memiliki tujuan utama diplomasinya, dan tujuan utama dari sebuah diplomasi bagi setiap negara adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Salah satu tujuan pokok dari diplomasi yang bermanfaat adalah untuk mencegah suatu negara bergabung dengan negara lain untuk melawan negara tertentu. Tujuan politik yang mendasar dari diplomasi adalah untuk mencapai tujuan-tujuannya secara damai. Akan tetapi diplomasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik tetap operatif baik selama damai maupun perang. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa perang dan damai merupakan kondisi eksklusif yang hampir tidak menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dengan demikian, diplomasi bisa memenuhi tujuan politiknya apabila didukung oleh kekuatan.

Selain politik yang menjadi perhatian utama diplomasi, ekonomi juga termasuk bagian penting yang diperhatikan dalam tujuan diplomasi. Dengan lahirnya sistem perdagangan bebas serta menimbulkan dampak atas penekanan ekonomi nasional, maka negara-negara maju maupun terbelakang bisa menggunakan perdagangan dan keuangan sebagai alat utama kebijaksanaan nasional. Dan akibatnya pencapaian perolehan-perolehan ekonomi telah menjadi tujuan penting dari diplomasi. Dan untuk mencapai tujuan diplomasinya itu, suatu negara melakukan negosiasi untuk meningkatkan kepentingan dagang. Selain itu, untuk melayani kepentingan dagang dan ekonomi, diplomasi modern telah mengembangkan sebuah mekanisme khusus yang berbeda dengan konsulat-konsulat lama. Selanjutnya, Budaya merupakan salah satu tujuan diplomasi.

Biasanya di dunia modern delegasi kebudayaan sering dikirim untuk membina hubungan baik dengan negara-negara lain. Tujuan diplomatik dengan mengirimkan delegasi kebudayaan adalah untuk memamerkan keagungan kebudayaan suatu negara untuk mempengaruhi negara yang ditujunya (*ibid*).

Sudah sangat jelas bahwa aspek ekonomi merupakan aspek yang sangat signifikan dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, tak terkecuali dengan negara-negara Asia Timur yaitu Cina dan Jepang. Dari Cina, Indonesia dapat mengimpor hasil-hasil industri ringan, tidak hanya mengimpor tapi Indonesia juga mengekspor bahan-bahan mentah ke Cina seperti minyak sawit.

I.6.2 Teori Kepentingan Nasional Ekonomi

Kepentingan nasional merupakan konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara (Masoed 1994, Hlm. 139). Kepentingan nasional menjadi dasar dari pembuatan strategi yang dijalankan oleh suatu negara. Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep yang paling dikenal luas oleh kalangan penstudi Hubungan Internasional karena konsep ini merupakan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri sebuah negara. Selain itu konsep ini juga sering dipakai sebagai pengukur keberhasilan suatu politik luar negeri.

Menurut Hans J. Morgenthau didalam "*The Concept of Interest defined in Terms of Power*", Konsep Kepentingan Nasional (Interest) yang didefinisikan dalam istilah "power" menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal atau "reason" yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional. (Jemadu 2008, hlm. 67) "*Morgenthau argued that interest was at the heart of all politics and thus on the international stage it behooved each state to pursue its national interest, generally defined as power.* (Pham 2008, hlm. 258)

Menurut Morgenthau *interest* merupakan jantung dari politik internasional, setiap negara pasti akan melakukan tindakan berdasarkan dorongan *national interest*-nya, di mana *national interest* secara umum didefinisikan sebagai *power*. *Power* ini sendiri pun bisa berupa *power* ekonomi, militer, politik, ideologi dan kebudayaan.

Hans J. Morgenthau stated, in American national interest, every political action is seen as directed toward keeping, increasing, or demonstrating power. The objective are 1) to maintenance of the objective the maintenance of the existing balance of power, 2) seeks to acquire more power, 3) seeks to show off strength in order to keep or expand power. (J. Peter Pham, 2008: 258)

Hans J. Morgenthau pun mengemukakan bahwa dalam *national interest* Amerika, setiap tindakan politik yang dilakukan adalah bertujuan untuk menjaga, meningkatkan dan mendemonstrasikan *power*-nya. Tujuannya adalah untuk 1) untuk menjaga kondisi *balance of power* yang ada, 2) mencari *power* yang lebih besar lagi, dan 3) untuk menunjukkan *power*-nya guna menjaga ataupun meningkatkan *power*-nya (Pham 2008, hlm 98).

Dalam hal ini pengaruh China yang kuat di kawasan Asia Tenggara itu berdampak kepada kepentingan nasional Indonesia dalam sector perdagangan, sehingga Indonesia meningkatkan kerjasama ekonomi untuk menyeimbangkan kekuatan perdagangan China terhadap Indonesia.

Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa kepentingan ekonomi nasional bersumber dari seluruh nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu Negara terhadap Negara lain. Kepentingan ekonomi nasional juga merupakan factor penting bagi setiap Negara dalam melaksanakan politik luar negerinya, dimana Negara tersebut tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategi untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri suatu Negara (Nasution 1983, 24).

I.6.3 Konsep Hambatan Non Tarif dalam Perdagangan

Hambatan Non Tarif (*Non Tariff Barriers*) adalah peraturan, regulasi, dan birokrasi yang menunda atau merintang pembelian barang – barang asing (Simamora 2007, hlm.32). Hambatan non tarif bersifat lebih halus daripada tarif

akan tetapi dampak ekonominya untuk mengurangi perdagangan kurang lebih serupa dengan tarif.

Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Akan tetapi, dalam praktek perdagangan internasional saat ini, kebanyakan pemerintah melakukan campur tangan dalam kegiatan perdagangan internasional menggunakan kebijakan lainnya yang lebih rumit, yaitu **Kebijakan Non tarif Barrier (NTB)**.

Hal ini dilakukan negara tersebut untuk menyembunyikan motif proteksi atau sekedar mengecoh negara lainnya. Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak negara yang memberlakukan kebijakan nontarif barrier walaupun beberapa ahli beranggapan bahwa kebijakan nontarif barrier dapat menjadi penghalang untuk tercapainya keterbukaan dalam perdagangan internasional.

Ada beberapa jenis hambatan non tariff yaitu;

a. Kuota Impor

Kuota impor adalah pembatasan secara langsung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Kuota impor dapat digunakan untuk melindungi sektor industri tertentu dan neraca pembayaran suatu negara. Negara maju pada umumnya memberlakukan kuota impor untuk melindungi sektor pertaniannya.

b. Embargo

Embargo adalah larangan menyeluruh terhadap perdagangan (impor maupun ekspor) atas satu atau beberapa jenis produk dengan negara tertentu. Seperti halnya kuota, embargo dapat dikenakan terhadap semua kategori produk kepada sebuah negara.

c. Pembatasan pembelian Nasional

Regulasi ini diberlakukan pemerintah untuk memberikan preferensi kepada produsen domestik dengan terkadang menyingkirkan sepenuhnya perusahaan asing. Preferensi pemerintah ini bisa berupa restriksi muatan dan bisa pula melalui mekanisme harga.

d. Dumping

Dumping adalah ekspor suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran, atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya.

e. Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor adalah pembayaran langsung atau pemberian keringanan pajak dan bantuan subsidi dari pemerintah kepada para eksportir atau calon eksportir nasional, dan atau pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara.

f. Hambatan Teknis

Standar – standar produk dan proses untuk kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, mutu, dan ukuran dapat menciptakan hambatan perdagangan dengan menyingkirkan produk yang tidak memenuhi standar dipergunakan untuk penghambat perdagangan

I.6.4 Konsep Residu Pestisida

Residu Pestisida adalah zat tertentu yang terkandung dalam hasil pertanian, bahan pangan, atau pakan hewan baik sebagai akibat langsung maupun tak langsung dari penggunaan pestisida Dampak Residu Pestisida Pada Kesehatan Keracunan: Tanda orang yang keracunan pestisida dalam jumlah cukup tinggi bermacam-macam, tergantung jenis pestisida yang digunakan. Namun, pada umumnya berupa sakit kepala, pusing, mual sampai muntah, gemetar, kejang, penglihatan kabur, berair liur banyak, bahkan ada yang sampai kehilangan kesadaran. Jangka Panjang: Kelainan alat reproduksi, Kanker, cacat lahir, mutasi genetic.

Perendaman dalam air panas (*blanching*) juga dapat menurunkan residu. Ada baiknya kita mengurangi konsumsi sayur yang masih mentah karena diperkirakan mengandung residu lebih tinggi dibanding kalau sudah dimasak

terlebih dulu. Pemasakan atau pengolahan baik dalam skala rumah tangga atau industri terbukti dapat menekan tekanan kandungan residu pestisida pada sayuran. Mengupas kulit buah dan sayuran sebelum dikonsumsi atau dimasak, membuang daun bagian luar pada selada, kubis dan sawi serta membuang bagian lemak pada daging unggas dan daging sapi adalah upaya lain dalam mengurangi residu pestisida.

Umumnya pestisida mengumpul di lemak, oleh karena itu mengurangi konsumsi lemak dapat mengurangi residu pestisida yang masuk dalam tubuh sekaligus mengurangi asupan kolesterol. Jangan selamanya membeli bahan makanan dari satu pasar dan satu tempat. Di berbagai tempat ada pasar bahan makanan organik yang cukup terjangkau. Anda bisa membeli bahan makanan yang mengandung anti-oksidan namun yang dikembangkan secara organik untuk mengurangi efek buruk pestisida yang mungkin masuk ke dalam tubuh anda. Untuk itu dibutuhkan nutrisi yang seimbang dari sumber yang jelas. Memanfaatkan pekarangan dg menanam sendiri berbagai buah dan sayuran seperti misalnya bayam, kangkung, terung-terungan, cabai, buncis, kacang panjang dan lain sebagainya. Selain lebih sehat, anda juga menghemat pengeluaran meskipun tidak banyak.

Pestisida yang masih tersisa pada bahan pangan setelah diaplikasikan ke tanaman pertanian. Tingkat residu pada bahan pangan umumnya diawasi dan ditetapkan batas amannya oleh lembaga yang berwenang di berbagai negara. Paparan populasi secara umum dari residu ini lebih sering terjadi melalui konsumsi bahan pangan yang ditanam dengan perlakuan pestisida, ditanam atau diproses di tempat yang dekat dengan area berpestisida. (International Union of Pure and Applied Chemistry. "pesticide residue". *Compendium of Chemical Terminology*). (ejournal.litbang.depkes.go.id).

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang mengutamakan data yang berupa pernyataan, statement yang bersifat kualitatif, bukan kuantitas yang dijadikan level pemahaman, sedangkan jenis penelitian diskriptif.

b. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari sumber resmi seperti wawancara dan dokumen resmi pemerintah. dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan atrikel-artikel lainnya yang relevan dengan tema skripsi.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak melakukan (*documentary research*) dan *internet research*. Data primer yang berasal dari sumber resmi seperti wawancara dengan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan dokumen resmi pemerintah. dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan atrikel-artikel resmi pemerintahan dan wawancara dengan Direktorat Kerjasama Bilateral Indonesia – China, Kementerian Luar Negeri Indonesia.

d. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data ini penulis menggunakan teori sebagai acuan dalam menginterpretasikan data-data yang ada. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian disaring (*coding*) dan disesuaikan dengan indikator-indikator yang diturunkan dari konsep-konsep yang ada dalam teori yang digunakan. Selanjutnya data-data tersebut diintegrasikan dan digeneralisasikan untuk memperoleh penjelasan umum terhadap masalah yang diteliti.

I.9 Asumsi

- a. Indonesia meyakini bahwa kebijakan residu pestisida yang diterapkan China mempengaruhi penurunan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke China tahun 2010-2011
- b. Diplomasi menjadi salah satu upaya untuk mengatasi masalah hambatan non tariff yang diterapkan oleh pemerintah China dalam komoditas sektor ekspor CPO Indonesia ke China
- c. Keberhasilan diplomasi ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah namun diplomasi juga dilakukan oleh sector swasta yaitu pengusaha CPO swasta.

I.10 Sistematika Penulisan

Bab I (Pendahuluan):

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Asumsi Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Model Analisis, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan. Dengan tujuan sebagai materi penunjang pembahasan di bab-bab selanjutnya.

Bab II (Dinamika Perdagangan Indonesia – China dalam Komoditi CPO):

Bab ini menjelaskan mengenai dinamika hubungan perdagangan Indonesia-China beserta hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam ekspor minyak sawit.

Bab III (Upaya Diplomasi Indonesia dalam menyikapi kebijakan Residu Pestisida china):

Menjelaskan mengenai seberapa jauh diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyikapi kebijakan China terhadap ekspor CPO.

Bab IV (Penutup):

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang terdapat di bagian permasalahan dan intisari dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta saran dari penulisan skripsi ini bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam menyikapi kebijakan perdagangan China dalam sector ekspor minyak kelapa sawit (CPO).

